



# **SOSIALISASI**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
231/PMK.07/2020

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah,  
Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah  
Daerah Lainnya

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
Jakarta, 14 Februari 2022

# Latar Belakang



- ❖ Dalam rangka simplifikasi pelaporan Pemda dalam upaya meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus menyediakan informasi keuangan daerah dengan lebih cepat, relevan, dan handal dalam rangka mewujudkan *evidence-based policy*.



- ❖ Perwujudan penyampaian IKD, laporan Data Bulanan dan Laporan Pemda Lainnya secara *paperless*.



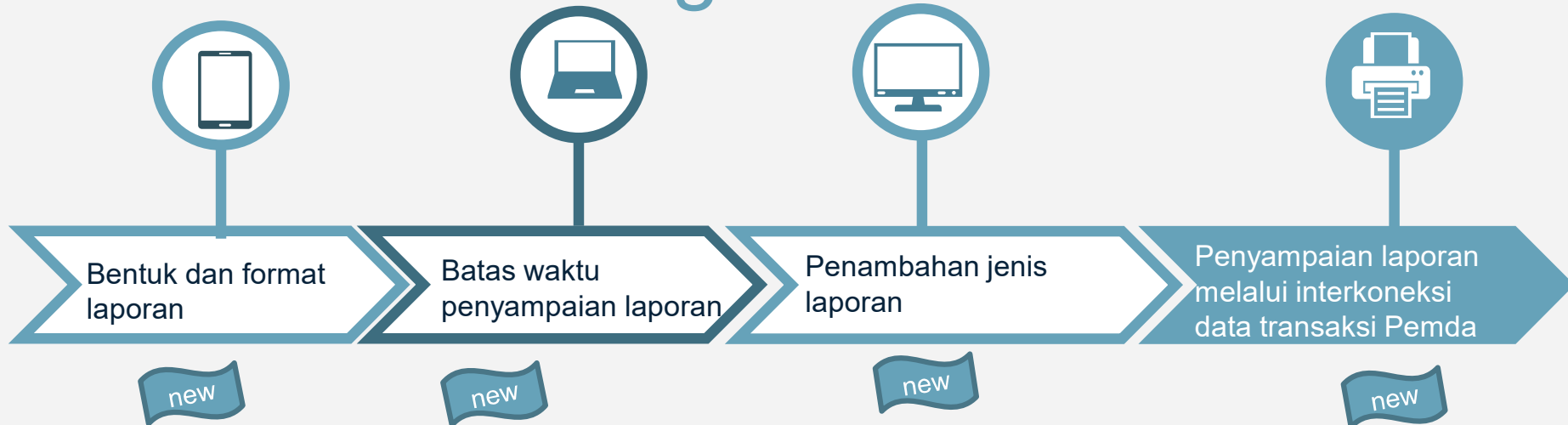
- ❖ Kompilasi pengaturan IKD dan laporan Data Bulanan yang ada di beberapa PMK, yaitu:
  - Pencabutan PMK.04/PMK.07/2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
  - Pencabutan Pasal 7, 8, 9 PMK.No.18/PMK.07/2017 Tentang Konversi Penyaluran DBH Dan/Atau DAU Dalam Bentuk Nontunai dan Lampiran yang mengatur mengenai format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan, format Laporan Posisi Kas Bulanan, format Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Bulanan, format Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Bulanan.
  - Pencabutan Pasal 8, 10, Lampiran I, dan Lampiran II PMK No.85/PMK.03/2019 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari APBD.



- ❖ Pengaturan atas penyampaian laporan sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum diatur dalam PMK, meliputi Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas.



# Pokok-Pokok Pengaturan dan Perubahan



Perubahan hardcopy semula dokumen fisik menjadi Portable Document Format/PDF.

Data bulanan semula tanggal 20 bulan berikutnya menjadi tanggal 5 bulan berikutnya.

1. Laporan Operasional,
2. Laporan Perubahan SAL
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan capaian output APBD triwulanan
5. Laporan Pemda sesuai permintaan DJPK dalam rangka konsolidasi fiskal nasional
6. Laporan selain data bulanan melalui interkoneksi data transaksi untuk Pemda yang telah melakukan interkoneksi data transaksi, yang diatur lebih lanjut dengan Perdirjen Perimbangan Keuangan.

Daerah yang telah melakukan interkoneksi data transaksi dan telah berstatus koneksi aktif serta datanya tersedia, maka laporan data bulanan dapat disampaikan melalui interkoneksi data transaksi kecuali data perkiraan belanja.



# Struktur PMK



01

**BAB I**  
Ketentuan Umum  
Ruang Lingkup

02

**BAB II**  
Tata Cara Penyampaian IKD, Laporan Data Bulanan,  
Dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya

03

**BAB III**  
Sanksi

04

**BAB IV**  
Ketentuan Penutup

05

**LAMPIRAN**





-BAB I-

# Ketentuan Umum



# Ruang Lingkup



## Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

- ❖ APBD
- ❖ Perubahan APBD
- ❖ Laporan Realisasi APBD Semester I
- ❖ LKPD
- ❖ Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal
- ❖ Dana Dekonsentrasi dan Dana TP
- ❖ Laporan Perusahaan Daerah



## Penyampaian laporan data bulanan

- ❖ Perkiraan Belanja
- ❖ Laporan Posisi Kas bulanan
- ❖ Ringkasan Realisasi APBD bulanan; dan
- ❖ Laporan DTH/RTH bulanan



## Penyampaian laporan Pemda lainnya

- ❖ Laporan Operasional
- ❖ Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas
- ❖ Laporan capaian output APBD triwulanan
- ❖ Laporan Pemda sesuai permintaan DJPK dalam rangka konsolidasi fiskal nasional.




## BAB II

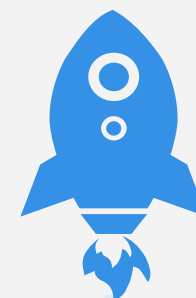
Tata Cara Penyampaian  
Informasi Keuangan Daerah,  
Laporan Data Bulanan dan  
Laporan Pemda Lainnya

# Pejabat Penandatangan, Penyampaian, Bentuk dan Format Penyampaian





		Pejabat Penandatanganan	Penyampaian	Bentuk dan format
IKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APBD</li> <li>• Perubahan APBD</li> <li>• Laporan Realisasi APBD Semester I</li> <li>• LKPD</li> <li>• Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal</li> </ul>	Pejabat sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD</li> <li>• Menteri Dalam Negeri</li> <li>• Menteri teknis terkait sesuai kebutuhan</li> </ul>	 Pindai Format pdf dan arsip data komputer melalui SIKD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Dekonsentrasi dan Dana TP</li> <li>• Laporan Perusahaan Daerah</li> </ul>			
Lap. Data Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan DTH/RTH</li> </ul>	Kuasa BUD	Dirjen PK melalui SIKD	 Pindai Format pdf dan arsip data komputer melalui SIKD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkiraan Belanja</li> <li>• Laporan Posisi Kas bulanan</li> <li>• Ringkasan Realisasi APBD bulanan</li> </ul>	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau pejabat yang lebih tinggi yang membidangi keuangan.	Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD	 Format pdf melalui SIKD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Operasional</li> <li>• Laporan Perubahan SAL</li> <li>• Laporan Perubahan Ekuitas</li> </ul>				
Lap. Pemda Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan capaian output APBD triwulanan</li> </ul>	PPKD atau pejabat yang membidangi keuangan	Menkeu c.q..Dirjen Perimbangan keuangan melalui SIKD	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lap. Pemda dalam rangka konsolidasi fiskal nasional, a.l: Lap. Pemda sesuai permintaan DJPK</li> </ul>	Sesuai peraturan per UU an atau pejabat yang berwenang	Menkeu c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan melalui SIKD	Bentuk dan format sesuai permintaan DJPK



# Batas Waktu Penyampaian



# Penyampaian Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah (Sinergi-5)



Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda yang telah ter-Interkoneksi dengan SIKD, melakukan penyampaian laporan bulanan melalui Interkoneksi Data Transaksi melalui Agen SIKD (Sinergi-5) \*).



Penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemda dapat dilakukan untuk laporan data bulanan yang memiliki status koneksi aktif.



Status koneksi aktif didasarkan pada status agen SIKD Pemda aktif dan posisi data terakhir yang ditarik paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemantauan status koneksi aktif \*\*).

*\*) Kecuali untuk penyampaian Perkiraan Belanja melalui upload pada Agen Sinergi-4*

*\*\*\*) Node aktif dan Data terkirim ke SIKD*



# Penyampaian Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah



Pemantauan status koneksi aktif dilakukan paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya. Penyampaian melalui interkoneksi data transaksi Pemda dilaksanakan sesuai proses bisnis.



Penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemda dapat juga dilakukan untuk selain data bulanan.



Ketentuan mengenai penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemda untuk selain data bulanan dan mekanisme proses bisnisnya diatur dengan Perdirjen Perimbangan Keuangan<sup>\*)</sup>

*\*) Saat ini Interkoneksi data baru untuk 3 jenis laporan bulanan*





BAB III

Sanksi



# Pengenaan Sanksi



## Phase 1

**Pengenaan sanksi** penundaan DAU atau DBH karena tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemda Lainnya.



## Phase 2

**Pencabutan sanksi dan penyaluran kembali** DAU atau DBH bagi Pemda yang telah menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemda Lainnya.



## Phase 3

**Penyaluran kembali diakhir tahun** untuk DAU atau DBH: paling lambat 2 hari kerja sebelum akhir tahun anggaran





BAB IV

Ketentuan  
Penutup



# Penutup





LAMPIRAN

Format  
Laporan

# LAPORAN DATA BULANAN PEMDA (1)

## Laporan Perkiraan Belanja (Penyampaian ke SKD melalui Sinergi-4)



PERKIRAAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN, DAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN BULANAN

Tahun Anggaran :  
Nama Daerah : Provinsi/Kabupaten/Kota..... \*)

(dalam ribuan rupiah)

JENIS PENGELUARAN KAS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
<b>A. Belanja Operasi</b>													
1. Belanja Pegawai													
2. Belanja Barang													
3. Belanja Bunga													
4. Belanja Subsidi													
5. Belanja Hibah													
6. Belanja Bantuan Sosial													
Jumlah Belanja Operasi													
<b>B. Belanja Modal</b>													
1. Belanja Tanah													
2. Belanja Peralatan dan Mesin													
3. Belanja Gedung dan Bangunan													
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
5. Belanja Aset Tetap Lainnya													
6. Belanja Aset Lainnya													
Jumlah Belanja Modal													
<b>C. Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>													
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah													
2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah													
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya													
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan													
<b>D. Transfer Bantuan Keuangan</b>													
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya													
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa													
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya													
4. Transfer Dana Otonomi Khusus													
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan													
<b>Jumlah Belanja dan Transfer (A+B+C+D)</b>													

BAGIAN BELANJA DAN TRANSFER DARI SILPA TAHUN LALU YANG BERSUMBER DARI DANA BAKUMAS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1. Belanja Operasi													
2. Belanja Modal													
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan													
4. Transfer Bantuan Keuangan													
Jumlah (1+2+3+4)													

\*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal - Bulan - Tahun  
Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan

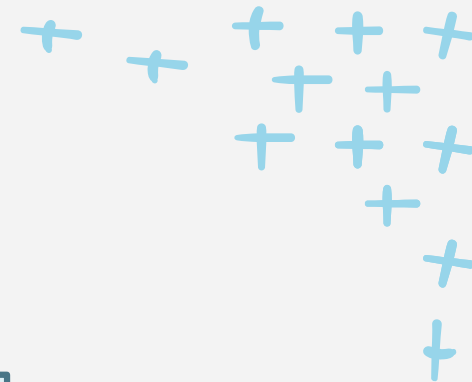
Nama





# LAPORAN DATA BULANAN PEMDA (2)

## Laporan Posisi Kas Bulanan



# LAPORAN DATA BULANAN PEMDA (3)

## Laporan Ringkasan Realisasi APBD



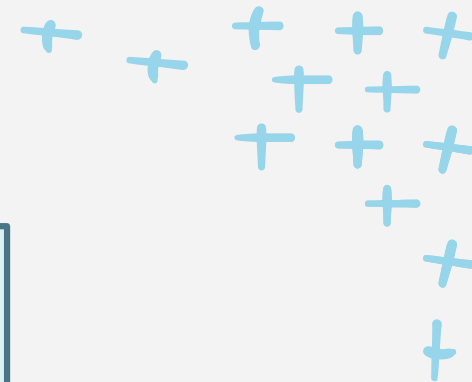
RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN			
Tahun Anggaran :			
Bulan :			
Nama Daerah :			
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN	.....	.....
2	Pendapatan Asli Daerah	.....	.....
...	Pajak Daerah	.....	.....
...	...dst	.....	.....
...	Pendapatan Transfer	.....	.....
...	Transfer Pemerintah Pusat	.....	.....
...	...dst	.....	.....
...	Lain-lain Pendapatan yang Sah	.....	.....
...	BELANJA	.....	.....
...	Belanja Operasi	.....	.....
...	...dst	.....	.....
...	Belanja Modal	.....	.....
...	...dst	.....	.....
...	Belanja Tak Terduga	.....	.....
...	...dst	.....	.....
...	TRANSFER	.....	.....
...	...dst	.....	.....
...	SURPLUS/DEFISIT	.....	.....
...	PEMBLAYAAN	.....	.....
...	...dst	.....	.....
...		.....	.....





# LAPORAN DATA BULANAN PEMDA (4)

## Laporan DTH/RTH



REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN ...  
Kecamatan ...  
Desa ...

Kategori		Sub-kategori		Detail	
No	Nama	No	Nama	Nilai	Uraian
1	...	1	...	...	...
2	...	2	...	...	...
3	...	3	...	...	...
4	...	4	...	...	...
5	...	5	...	...	...
6	...	6	...	...	...
7	...	7	...	...	...
8	...	8	...	...	...
9	...	9	...	...	...
10	...	10	...	...	...

Penyusunan laporan ini didasarkan pada data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kebenarannya.

Kepala Desa  
[Nama Kepala Desa]  
[Alamat Kepala Desa]

Ketua BPD  
[Nama Ketua BPD]  
[Alamat Ketua BPD]

REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN ...  
Kecamatan ...  
Desa ...

Kategori		Sub-kategori		Detail	
No	Nama	No	Nama	Nilai	Uraian
1	...	1	...	...	...
2	...	2	...	...	...
3	...	3	...	...	...
4	...	4	...	...	...
5	...	5	...	...	...
6	...	6	...	...	...
7	...	7	...	...	...
8	...	8	...	...	...
9	...	9	...	...	...
10	...	10	...	...	...

Penyusunan laporan ini didasarkan pada data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kebenarannya.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kebenarannya.

Kepala Desa  
[Nama Kepala Desa]  
[Alamat Kepala Desa]

Ketua BPD  
[Nama Ketua BPD]  
[Alamat Ketua BPD]



# LAPORAN REALISASI OUTPUT PENGGUNAAN APBD



**LAPORAN REALISASI KELUARAN/OUTPUT PENGGUNAAN APBD**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
 TRIWULAN.....(2) TAHUN .....(3)

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Keluaran/Output Penggunaan APBD ini dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Indikator	Satuan Indikator	Realisasi Keluaran/Output			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Program ...: 1. Kegiatan ... 2. Kegiatan ... 3. dan ...							
Dit.....								
Jumlah								

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

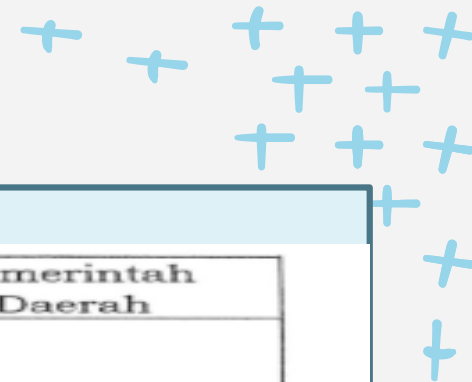
.....(14)  
 .....(15)  
 .....(16)  
 .....(17)

**PETUNJUK PENGISIAN**

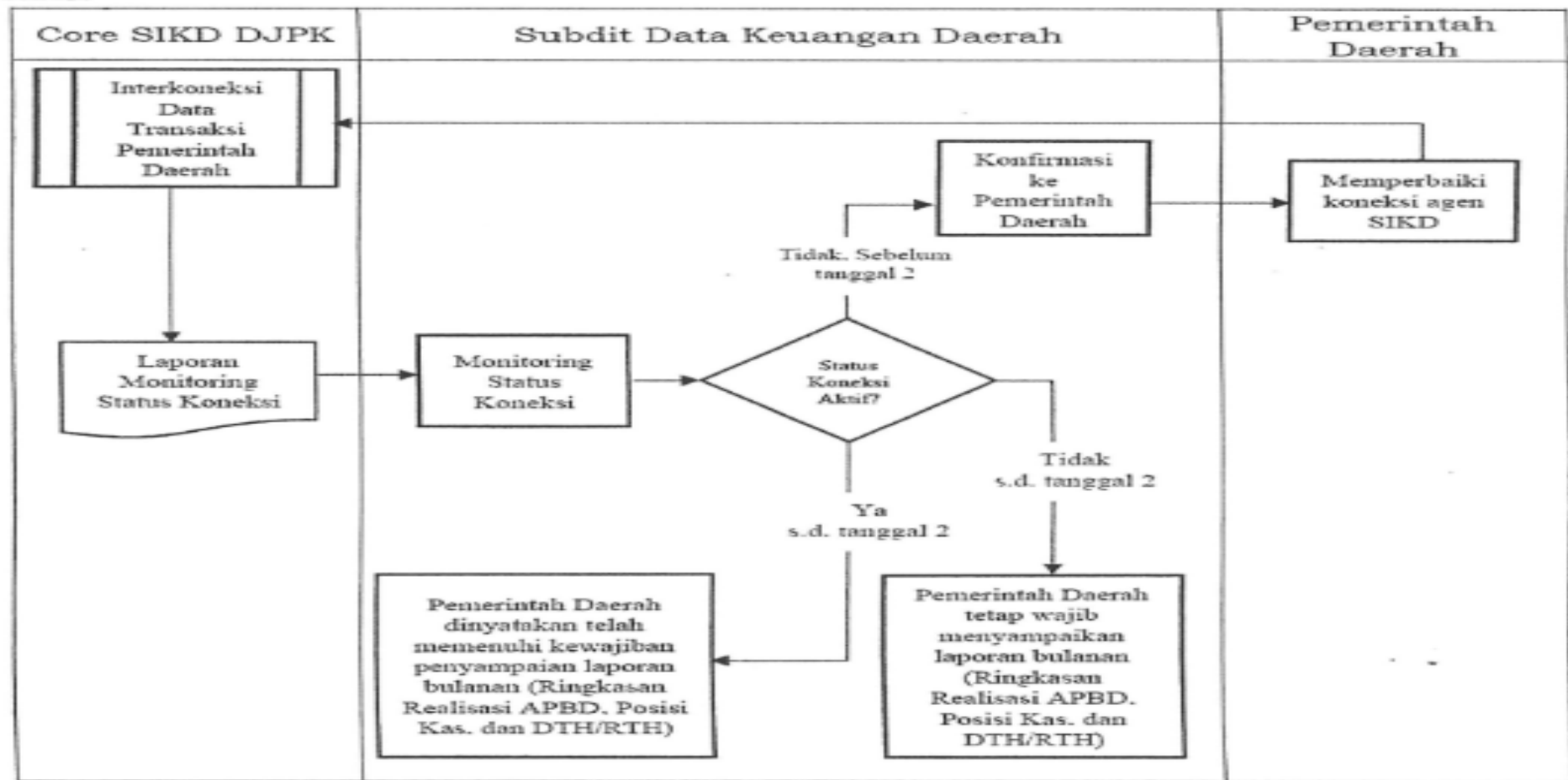
NO	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
(2)	Diisi dengan triwulan penyampaian laporan
(3)	Diisi dengan tahun anggaran penyampaian laporan
(4)	Diisi nama pejabat yang menandatangani dokumen
(5)	Diisi sesuai dengan sumber dana APBD yang digunakan untuk mendanai belanja program/kegiatan terkait
(6)	Diisi sesuai nomenklatur program dan kegiatan dari belanja APBD
(7)	Diisi dengan nomenklatur indikator capaian keluaran/output per kegiatan dari belanja APBD
(8)	Diisi dengan target indikator capaian keluaran/output per kegiatan dari belanja APBD
(9)	Diisi dengan satuan dari indikator capaian keluaran/output per kegiatan dari belanja APBD
(10)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan I tahun berkenaan
(11)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan II tahun berkenaan
(12)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan III tahun berkenaan
(13)	Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan IV tahun berkenaan
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan dokumen
(15)	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan.
(16)	Tanda tangan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
(17)	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan.



# MEKANISME PENYAMPAIAN DATA MELALUI INTERKONEKSI



## ALUR & PROSEDUR KERJA





TERIMA KASIH